

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) TERHADAP BELANJA MODAL, *ECONOMIC GROWTH* SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PROVINSI JAWA TIMUR**

**Afifah Tamara Budiriananti<sup>1)</sup>, Anny Widiasmara<sup>2)</sup>, M. Agus Sudrajat<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun

email: [afifahtamara96@gmail.com](mailto:afifahtamara96@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun

email: [anny.asmara@gmail.com](mailto:anny.asmara@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun

email: [agussudrajat84@gmail.com](mailto:agussudrajat84@gmail.com)

**Abstract**

*The implementation of decentralization requires the transfer of power to the regions in order to manage their financial resources, so that the regions have a great chance to manage their budgets. Utilization of public expenditure needs is intended to improve public services to the community and increase public welfare. Regional expenditure can be used as a benchmark for the success of regional government administration. In addition, in implementing decentralization, the government must control regional finances properly and effectively. The purpose of this study is to empirically prove that PAD, DAU and DAK affect Regional Expenditures in East Java Province and to prove empirically that Economic Growth can moderate PAD, DAU and DAK and affect Regional Expenditures. The techniques used in this case study and causal analysis were used to model experimental studies to examine the relationship between changes. The results of the above study indicate that PAD has no effect on Regional Expenditures, while DAU and DAK have a significant effect on Regional Expenditures. Economic growth (PDRB) is not able to moderate the influence of PAD on regional spending, as well as DAU and DAK*

**Keywords:** *Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Capital Expenditure, Economic Growth*

**Abstrak**

Pelaksanaan desentralisasi memerlukan penyerahan kekuasaan kepada daerah guna mengolah sumber daya keuangannya, sehingga daerah memiliki kemungkinan yang besar untuk mengelola anggarannya. Pemanfaatan kebutuhan belanja publik dimaksudkan untuk menaikkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menaikkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, dalam melaksanakan desentralisasi, pemerintah harus mengendalikan keuangan daerah dengan baik dan efektif. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan secara empiris bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh kepada Belanja Daerah di Prov Jatim serta untuk membuktikan secara empiris bahwa *Economic Growth* dapat memoderasi PAD, DAU dan DAK dan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Teknik yang digunakan dalam studi kasus ini dan analisis kausal digunakan untuk memodelkan studi eksperimental untuk menguji hubungan antara perubahan. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh kepada Belanja Daerah, sedangkan DAU serta DAK Berpengaruh signifikan kepada Belanja Daerah. Economic growth (PDRB) tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja daerah, begitu pula dengan DAU serta DAK.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, Economic Growth

## PENDAHULUAN

Otodas berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Dalam Negeri dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Keuangan Pusat dan Keuangan, berlaku efektif Januari 2001. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dalam Negeri serta UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta daerah menyatakan dari kedudukan ini daerah pemenang daerah daerah mandiri dan pemerintahan daerah, dan kekuasaan dan wakil pemerintah pusat, kepala daerah setempat yaitu gubernur, kemudian diteruskan ke kabupaten/kota, sebagai wakil dan walikota.

Keputusan untuk menerapkan desentralisasi fiskal membutuhkan dorongan ekonomi. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan penyerahan kekuasaan kepada daerah guna mengolah sumber daya keuangannya, sehingga daerah memiliki kemungkinan yang besar untuk mengelola anggarannya. Salah satu cara pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah ialah mengupayakan sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dan dana kompensasi dengan dana alokasi umum serta dana alokasi khusus yang dirancang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. struktur Anggaran Terjangkau. UU no. 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa dana kompensasi ialah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diperuntukkan bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana kompensasi tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH). Dana peruntukan dan dana peruntukan khusus merupakan dana perimbangan yang tujuannya menekankan pada aspek pemerataan dan pemerataan yang relevan dengan penyelenggaraan urusan negara (UU No. 32 Tahun 2004). Perbandingan keuangan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah adalah sistem distribusi dana yang adil, komparatif, demokratis, transparan, dan efisien dalam sistem keuangan untuk pelaksanaan distribusi, yang juga mempertimbangkan kapasitas, persyaratan, dan kebutuhan daerah sebagai sumber pendanaan. platform untuk pengembangan terdistribusi dan bersama. -kerja yang tepat.

Ada pula DAK yang berperan Perbandingan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah sistem penganggaran yang adil, komparatif, demokratis dan efisien dalam sistem keuangan untuk operasi distribusi, yang juga memperhitungkan kemampuan, kebutuhan, dan persyaratan daerah sebagai basis pendanaan dan koreksi pekerjaan.

PAD di Jawa Timur juga terjadi dalam lima tahun terakhir dari PAD yang tinggi. Pada tahun 2014 PAD Jawa Timur sebesar Rp 12.302.739.565, dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2015 PAD Jatim saya naiki Rp.14.769.464.926, tahun 2016 juga naik menjadi Rp.15.417.179.370 dan pada tahun 2017 PAD Propinsi Jawa Timur naik menjadi Rp.19.910.511.891 sampai pada tahun 2018 naik menjadi

Rp.17.146.667.416. Kenaikan PAD propinsi Jawa timur Jaringan ini terkait dengan upaya pemerintah untuk menggali dan memperluas kapasitasnya. Gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan penerimaan daerah dilihat dari dana kompensasi yang meliputi Dana Umum dan Dana Bantuan Khusus Kabupaten Jawa Timur Tahun 2013-2018.

Pelaksanaan Dana Alokasi dan Dana Alokasi Khusus setiap tahun mengalami kemajuan. Pada tahun 2013 dana abadi umum sebesar Rp 30.944.073.331, namun pada tahun 2014 sebesar Rp 33.592.335.375 dan terus meningkat dari Rp 34.318.394.347 pada tahun 2016 menjadi Rp 336.415.477 pada tahun 2017 gagal Rp.36.024.301.286. kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.36.079.886.339. Tahun 2013 dana alokasi khusus sebesar Rp.2.202.303.656 mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp.2.325.129.819 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015 menjadi Rp.3.623.147.218 pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.10.342.358.629 pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp.10.667.573.673. kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.11.687.119.578. Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar Dana Kompensasi Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya dan terus bertambah. Jika alokasi dana publik dilakukan dengan benar, maka nantinya dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dengan menekankan pembangunan daerah. Sedangkan realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2013 samapi 2018 menurut data perkembangan realisasi pembiayaan daerah juga memperlihatkan adanya tren kenaikan.

Meskipun pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta alokasi belanja daerah porivinsi Jawa Timur tahun 2013 – 2018 selalu mengalami kenaikan, namun sejak tahun 2017 hingga 2018 ada kecenderungan penurunan, bahkan pada laporan PAD tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Hal ini memberi hasil yang kontradiktif terhadap semangat otonomi daerah yang sedang berkembang.

Jika kita melihat tren dan fenomena tersebut, maka akan muncul permasalahan umum yang sering dialami oleh pemerintah, seperti Iuran PAD untuk Perumahan dan Perumahan Daerah (APBD). Sederhana, tetapi harus memenuhi kebutuhan masyarakat. . Perluasan pusat perbelanjaan tidak membutuhkan banyak uang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.

Dengan kata lain, peran kontribusi pajak pemerintah pusat dalam bentuk hibah dan hibah, distribusi pajak dan bukan pajak mendominasi komposisi rumah tangga. Pemanfaatan kebutuhan belanja publik dimaksudkan untuk menaikkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menaikkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, dalam melaksanakan desentralisasi, pemerintah harus mengendalikan keuangan daerah dengan baik dan efektif.

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menguji secara

empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus(DAK) terhadap belanja modal, *economic growth* sebagai variabel pemoderasi.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

### **Kajian Teori**

#### **Belanja Daerah**

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diperlakukan sebagai pengurang kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja ritel.

#### **Economic Growth Daerah**

*Economic Growth* adalah peningkatan kegiatan ekonomi, yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran praktis ekonomi dan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan nasional (GNP) dari pendapatan nasional ke perekonomian tetap, meskipun pertumbuhannya di atas atau di bawah ambang batas populasi atau ada perubahan jumlah penduduk. struktur ekonomi.

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara dan Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan asli daerah yang dipungut berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan berasal dari: pajak daerah, pajak daerah, kesenjangan ekonomi daerah dan pendapatan daerah.

#### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) ialah Perkiraan termasuk penerimaan dari APBN dengan harapan adanya pemerataan sumber daya keuangan di daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah, asalkan ada pelaksanaan yang terdistribusi (Keputusan No. 33 2004). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, besaran DAU adalah sekitar 25% dari pendapatan nasional yang ditentukan oleh APBN. DAU kabupaten dan kabupaten/kelurahan ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%.

#### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus (DAK) berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendukung kebutuhan khusus, termasuk dana untuk penghijauan hutan (Amin, 2019: 72). Kebutuhan spesifik yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat diprediksi dengan kombinasi distribusi publik dan komitmen atau prioritas nasional.

### **Hipotesa**

#### **1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Peningkatan PAD harus dilakukan karena hal ini merupakan hasil dari upaya pendanaan untuk mencapai swasembada menurut daerah dapat berupa penyaluran. (Marwani, Darwanis, Abdullah, 2013). Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Putri (2015), menegaskan bahwa keuntungan Kabupaten memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Peningkatan belanja seharusnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD (Darise, 2009). Kenaikan PAD seharusnya berdampak positif terhadap APBN. Selain itu, kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan partisipasi atau kontribusi nasional terhadap pembangunan daerah, yang tercermin dari peningkatan PAD.

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh kepada Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018

## **2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum ialah dana dari pendapatan APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menutupi kemacetan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bantuan PAD. DAU merupakan bagian dari pengeluaran dalam APBN dan bagian dari pendapatan dalam APBD Talangamin, Kindangen dan Koleangan (2018). DAU merupakan salah satu pengeluaran pemerintah dari APBN dengan tujuan untuk mencapai standar fiskal federal yang tinggi dalam rangka mendanai kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan perimbangan. Sehingga pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas alokasi anggaran dengan mengalokasikan dana neraca (DAU, DAK dan DBH) berupa alokasi belanja daerah untuk belanja biasa dan modal (Mukhlis, 2012).

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh kepada belanja Modal Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2018.

## **3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus, yang sekarang disebut DAK, adalah anggaran pemerintah yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan khusus daerah sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). Menggunakan DAK untuk investasi pembangunan, pengadaan, renovasi, rehabilitasi fisik dan pekerjaan umum pada tahun ekonomi Talangamin., Kindangen dan Koleangan (2018)

Dengan memberikan dana kompensasi (DAK, DAU serta DBH) berupa Dalam mengalokasikan dana daerah untuk belanja bersama dan modal, pemerintah daerah dapat menentukan langkah-langkah prioritas alokasi anggaran (Mukhlis, 2012). DAK bertujuan untuk membantu pelaksanaan kegiatan tertentu di beberapa daerah yang memiliki daerah bermasalah dan relevan dengan negara prioritas. Khusus untuk mendanai kebutuhan pelayanan publik dan perusahaan publik yang tidak memenuhi standar tertentu atau mendorong pembangunan yang pesat (Marbun, 2005).

Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian tentang. Berdasarkan analisis

teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian dirumuskan yaitu:  
H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh kepada Belanja Modal di Prov Jatim Tahun 2013 – 2018.

#### **4. Pengaruh *Economic Growth* Memoderasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

PAD merupakan sumber publikasi daerah. Harapan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat memberi makan pertumbuhan ekonomi daerah dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan daerah menghasilkan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi jika PAD daerah ditingkatkan dan didukung oleh belanja daerah yang penting, maka perekonomian akan tumbuh. Artinya PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan belanja daerah sebagai media to variable. Studi yang disiapkan oleh Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013) menegaskan bahwa PAD berdampak pada PDRB melalui belanja daerah. Beberapa studi penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Chamelia (2015) menekankan efektivitas biaya dalam PAD dibandingkan dengan PDRB. Hipotesis dibangun berdasarkan data dasar dan hasil penelitian sebelumnya yaitu:

H4 : *Economic Growth* dapat memoderasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berpengaruh kepada Belanja Daerah di Prov Jatim Tahun 2013 – 2018

#### **5. Pengaruh *Economic Growth* Memoderasi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana kompensasi termasuk pajak dan PNBPN, serta DAU dan DAK, transfer dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk membiayai belanja daerah. Jika belanja daerah diketahui lebih tinggi dari pendapatan daerah, maka ada batasannya. Untuk membiayai pengeluaran dalam negeri, pemerintah pusat mengeluarkan dana dan manfaat bagi pemerintah. Uang harus digunakan secara bijaksana oleh pemerintah pusat untuk memperbaharui uang pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hasilnya adalah belanja dan penganggaran daerah (SAD) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).

Penelitian Mawarni, Darwanis dan Abdullah (2013) menunjukkan bahwa PAD berdampak pada PDRB didukung oleh media regional. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Juwari, Setyadi dan Ulfa (2016) menunjukkan bahwa PAD berdampak negatif terhadap PDRB yang ditopang oleh belanja daerah.

H5 : *Economic Growth* dapat memoderasi Dana Alokasi Umum (DAU) serta berpengaruh kepada Belanja Modal di Prov Jatim Tahun 2013 – 2018.

#### **6. Pengaruh *Economic Growth* Memoderasi Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana dari pendapatan anggaran yang dialokasikan untuk suatu daerah tertentu dengan tujuan membiayai kegiatan khusus dengan fokus daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang ditetapkan (Darise, 2009 dalam Sari dan Indrajaya). , 2014 ). Dengan meningkatnya

Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja daerah untuk kebutuhan daerah meningkat. Jika pengeluaran saya meningkat, ekonomi daerah juga bisa tumbuh. Oleh karena itu, hasil belanja daerah yang moderat dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Studi yang disusun oleh Juwari, Setyadi dan Ulfa (2016) menegaskan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB berdasarkan belanja daerah. Berdasarkan analisis analitis dan hasil penelitian sebelumnya.

H6 : *Economic Growth* dapat memoderasi Dana Alokasi Khusus berpengaruh kepada Belanja Modal di Prov Jatim Tahun 2013 – 2018

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Populasi ialah wilayah umum meliputi: benda/mata pelajaran yang memiliki ciri dan bentuk oleh karena itu berasal dari studi penelitian (Jogiyanto Hartono, 2012). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur sebanyak 29 kabupaten dan 9 kota.

Sampel ialah bagian dari jumlah serta sifat yang digunakan oleh masyarakat. Sampel yang dipakai harus mewakili populasi (Jogiyanto Hartono, 2012). Sampel dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten dan kota di Prov Jatim. Survei sampel dilakukan dengan memakai teknik sensus, yaitu suatu metode pengumpulan data yang meneliti seluruh elemen masyarakat satu per satu.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Berdasarkan (Ghozali, 2013), analisis deskriptif dipakai dalam penelitian ini guna menggambarkan maupun menggambarkan variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif adalah nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Salah satu cara paling sederhana untuk menggambarkan sisa-sisa normal adalah dengan menunjukkan model P-P normal dari model pemulihan sisa. Temuan dapat dilakukan dengan mengamati distribusi data (titik) pada pegangan diagonal grafik atau dengan mengamati histogram residual. Sedangkan data (skor) terdistribusi sepanjang garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram yang menunjukkan pola terdistribusi normal, model regresi melengkapi pola asumsi normal. Jika data tersebar secara diagonal dan tidak mengikuti arah diagonal, jika histogram plot menunjukkan pola yang terdistribusi normal, maka replikasi sampel tidak sesuai dengan asumsi normal. (Ghozali, 2013).

##### **Uji Autokorelasi**

Menurut (Ghozali, 2013), Eksperimen autokorelasi dilakukan untuk menilai apakah terdapat korelasi linier antara korelasi error pada periode  $t$  dan periode  $t-1$  (dulu). Jika ada korelasi, seseorang berbicara tentang korelasi. Metode pengujian

yang paling umum digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW). Untuk menguji ada tidaknya sinyal autokorelasi, DW(d) dibandingkan dengan d1 atau du.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dimaksudkan guna memeriksa apa terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Cara mengenali multikolinieritas dengan menilai matriks korelasi antara variabel independen dan menghitung toleransi dan nilai VIF. Nilai cut-off yang biasa digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas ialah nilai toleransi 0,10 maupun sama dengan nilai VIF 10 (Ghozali, 2013).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas objektif terdiri dari pembuktian apakah terdapat ketidaksamaan selisih antara Sisanya adalah satu pengamatan dan pengamatan lain. Jika masih terdapat perbedaan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dikatakan homoskedastisitas jika perbedaan tersebut disebut heteroskedastisitas. Ini pertanda buruk homoskedastisitasnya. Bukti adanya kurangnya heteroskedastisitas dapat diperoleh dengan mengamati ada tidaknya pola spesifik pada hamburan blok (Ghozali, 2013).

### Uji Hipotesis

#### Persamaan Regresi

Pengujian hipotesis dengan menggunakan model analisis regresi linier variabel independen terhadap variabel dependen:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \varepsilon \dots \dots \dots (\text{Formula I})$$

Keterangan :

- Y : Belanja Daerah
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana lokasi Khusus  $\alpha$ : Konstanta
- $\beta_1, 2, 3$  : Koefisien Regresi
- $\varepsilon$  : *Error*

#### Persamaan MRA (Moderated Regression analysis)

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + \beta_4 \text{EG} + \beta_5 \text{PAD} * \text{EG} + \beta_6 \text{DAU} * \text{EG} + \beta_7 \text{DAK} * \text{EG} \dots (\text{Formula II})$$

Keterangan :

- Y : Belanja Daerah
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana lokasi Khusus
- EG : Economic growth
- PAD\* EG : Pendapatan Asli Daerah\* Economic growth
- DAU \*EG : Dana Alokasi Umum\* Economic growth

DAK \*EG : Dana lokasi Khusus \* Economic growth

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4,5,6,7}$  : Koefisien Regresi

$\varepsilon$  : *Error*

## Uji R<sup>2</sup>

Persamaan determinasi (R<sup>2</sup>) mengukur ukuran sampel dapat menjelaskan variabilitas dalam variabel ketergantungan. Nilai koefisien motivasi berada diantara nol sampai satu (Ghozali, 2013).

## Uji t

Uji hipotesis parsial dipakai dengan menggunakan uji-t. Berdasarkan (Ghozali, 2013) uji t-statistik secara umum memperlihatkan pengaruh variabel penjelas/independen untuk memperjelas penjelasan variabel dependen. Jika nilai Sig < 0,05 maka hipotesis akan diterima dan jika nilai Sig > 0,05 maka hipotesis akan ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	102	90269505	283488703	1.82E8	4.514E7
DAU	102	378916109	1254496229	7.71E8	2.322E8
DAK	102	23097660	346060851	1.54E8	1.042E8
PDRB	102	3.65E9	8.53E10	1.4649E10	1.38550E10
BD	102	5.80E8	2.30E9	1.4769E9	4.71942E8
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Output SPSS Versi 17

Berdasarkan tabel diatas, merupakan penjelasan statistik deskriptif yaitu nilai minimum, maksimum dan *mean* masing – masing variabel:

- Variabel pertumbuhan ekonomi BD (Y) memiliki nilai minimum sebesar 5,80; nilai maksimum sebesar; rata-rata sebesar 2.30E9
- Variabel PAD (X1) memiliki nilai minimum sebesar 90269505 ; nilai maksimum sebesar 283488703 rata-rata sebesar 1.82E8
- Variabel DAU (X2) memiliki nilai minimum sebesar 378916109 ; nilai maksimum sebesar 1254496229; rata-rata sebesar 7.71E8
- Variabel DAK (X3) nilai minimum sebesar 23097660 ; nilai maksimum sebesar. 346060851 ; nilai rata-rata sebesar 1.54E8
- Variabel BD (Z) nilai minimum sebesar 5.80E8; nilai maksimum sebesar 2.30E9; nilai rata-rata sebesar 1.4769E9

**Uji Asumsi Klasik****Uji Normalitas****Tabel 2 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test*  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	-.0000003
	Std. Deviation	8.97731868E7
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.034
Kolmogorov-Smirnov Z		.557
Asymp. Sig. (2-tailed)		.915

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS versi 17

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, tabel 4.3 menunjukkan nilai K-S sebesar 0,915 dan nilai  $> 0,05$ . Dan Anda mengerti bahwa informasi tersebar luas.

**Uji Autokorelasi****Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi *Durbin Watson*  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	.966 <sup>a</sup>	.933	.931	1.798

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS versi 17

Berdasarkan dari hasil Uji autokorelasi pada Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa skor Durbin-Watson (d) adalah 1,798 dengan taraf signifikansi 0,000 (0%), dengan jumlah sampel (n) 102 ek dari 5 variabel bebas dan variabel terikat (k) pada , maka nilai tabel yang diterima  $d_l = 1,7176$ ;  $d_u = 1,8199$ . Sehingga menampilkan nilai  $d_u < d < 4-d_u$  yakni  $1,7176 < 1,798 < 2,1801$  yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

**Uji Multikolinieritas****Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

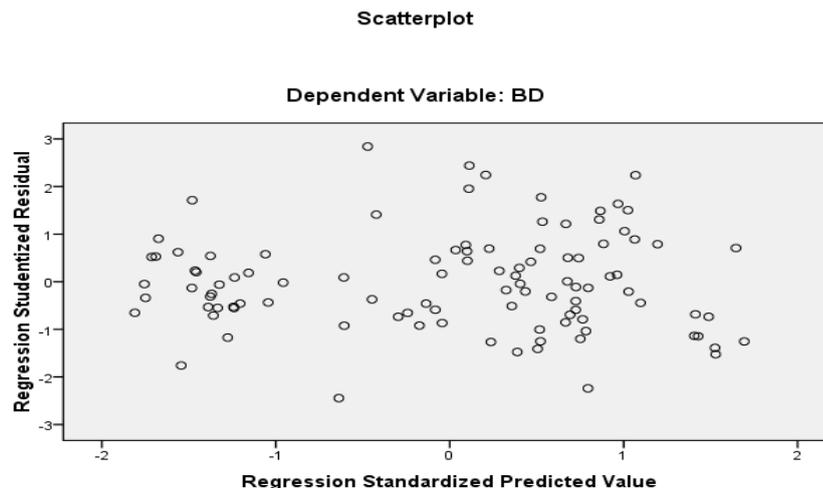
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6.971E7	4.112E7			
	PAD	.709	.270	.068	.561	1.782
	DAU	1.615	.052	.795	.575	1.739
	DAK	1.047	.107	.231	.665	1.503
	PDRB	.001	.001	.022	.753	1.328

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS versi 17

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.5, seluruh variabel bebas diketahui memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas yang mengganggu antar variabel bebas dalam model regresi ini.

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas *Scatter Plot***

Gambar 1 memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dijelaskan tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi ini.

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Statistik t Regresi Linear Berganda

**Tabel 5 Hasil Uji Regresi linier berganda**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1.118	.266
	PAD	.571	.569
	DAU	26.152	.000
	DAK	5.826	.000

a. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel diatas, dapat diartikan, sebagai berikut

1. Variabel PAD menunjukkan t hitung 0,571 dan dengan nilai signifikansi 0,569 lebih dari 0,05, berarti PAD tidak berpengaruh kepada Belanja Daerah , sehingga H1 ditolak.
2. Variabel DAU menunjukkan t hitung 26,152 dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, berarti DAU berpengaruh signifikan kepada Belanja Daerah, sehingga H2 diterima.
3. Variabel DAK menunjukkan t hitung 5,862, dengan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, berarti DAK berpengaruh signifikan kepada Belanja Daerah, sehingga H3 diterima.

## Uji statistik t MRA

**Tabel 5 Hasil Uji t MRA**

Model		t	Sig.
1	(Constant )	-.038	.969
	PAD	2.434	.017
	DAU	21.362	.000
	DAK	5.981	.000
	PDRB	.544	.587
	PAD.Z	.132	.895
	DAU.Z	.038	.970
	DAK.Z	-.251	.803

a. Dependent Variable: BD

Menurut tabel di atas, dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Economic growth (PDRB) dalam memberikan moderasi dari pengaruh PAD terhadap Belanja daerah yang menunjukkan nilai t hitung 0,132 dengan nilai signifikansi sebesar 0,895 lebih dari 0,05, berarti Economic growth (PDRB) tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja daerah, sehingga

H4 ditolak.

- b. Economic growth (PDRB) dalam memberikan moderasi dari pengaruh DAU terhadap Belanja daerah yang menunjukkan nilai t hitung 0,038 dengan nilai signifikansi sebesar 0,970 lebih dari 0,05, berarti Economic growth (PDRB) tidak mampu memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja daerah, sehingga H5 ditolak.
- c. Economic growth (PDRB) dalam memberikan moderasi dari pengaruh DAK terhadap Belanja daerah yang menunjukkan nilai t hitung -0,251 dengan nilai signifikansi sebesar 0,803 lebih dari 0,05, berarti Economic growth (PDRB) tidak mampu memoderasi pengaruh DAK terhadap Belanja daerah, sehingga H6 ditolak.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.966 <sup>a</sup>	.933	.931

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Berdasarkan tabel diterangkan bahwa besarnya *Ajusted R square* ialah 0,933, hal ini artinya prosentase variabel independen yaitu PAD, DAU dan DAK dalam memberikan pengaruh terhadap variabel dependen 93,3% variabel sedangkan sisanya 6,7 % dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

### PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis diatas, pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. PAD Berpengaruh Terhadap Belanja daerah

Variabel PAD memiliki nilai t-hitung sebesar 0,571 dan nilai rerata 0,569 lebih besar dari 0,05 yang berarti PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, dan menolak H1. Berarti variabel PAD tidak berpengaruh kepada belanja daerah. Hasil penelitian menampilkan poin pertama dalam kajian pendapatan nasional (PAD) ini berdampak pada belanja daerah di Prov Jatim tahun 2013-2018.ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sependapat dengan (Adiyatma, 2015) bahwa belanja publik untuk penanaman modal belum tentu semakin tinggi semakin tinggi pendapatan awal daerah. Di kantor-kantor agen, hubungan kontraktual antara agen (perusahaan) dan pelanggan (pemerintah) di distrik kantor lokal dapat dilihat dalam

kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan melalui penunjukan ini meningkatkan keberhasilan bersama. . Investasi seperti penyediaan lapangan kerja dan aset dibiayai dengan baik setiap tahun dengan merencanakan investasi sedangkan investasi berasal dari pendapatan nasional. Dalam penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya tidak signifikan, mungkin karena peningkatan pendapatan dari aset negara tidak dicapai dengan peningkatan investasi.

## **2. DAU Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Tabel 5, jumlah pembacaan adalah 26,152 dan nilai rata-rata 0,000 kurang dari 0,05 yang berarti bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja nasional. Artinya variabilitas DAU berdampak pada belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poin kedua dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak pada belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan rantai pasok (DAU) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk belanja pemerintah. Oleh karena itu, DAU memiliki kontribusi yang signifikan jika dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya seperti DAK dan dana kliring. Sebagai penyaluran yang terorganisir, DAU dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik; H. Percepatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan dapat menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan daerah dan ekonomi (Departemen Dalam Negeri, 2013). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Permatasari, 2016). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah penerimaan dari APBN yang digunakan untuk menjamin pemerataan kekuatan fiskal antar daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan alokasi yang disalurkan. Artinya di setiap daerah, DAU wajib menggunakan instansi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada negara. Selain itu, DAU ialah negara donor, artinya pemanfaatan daerah dibiarkan sejalan dengan prioritas daerah dan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan kemandirian. Pendanaan berkaitan dengan pendanaan, karena pendanaan yang diterima dari pemerintah federal dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diperoleh melalui pembangunan infrastruktur dan perumahan.

## **3. DAK Berpengaruh Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa DAK memiliki nilai sebesar 5.862 dengan nilai nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti DAK memiliki nilai yang signifikan dalam belanja negara. Artinya variabel DAK berpengaruh terhadap belanja negara. Hasilnya menyoroti poin kedua dalam penelitian ini, yaitu Pengurangan Bencana (DAK), dampaknya terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2018. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Adiyatma, 2015; Permatasari, 2016) bahwa Fundraising adalah anggaran negara yang dialokasikan

untuk suatu daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu dan prioritas daerah dan nasional. . DAK digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan, pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan proyek-proyek struktural dan infrastruktur yang berumur panjang. Pendanaan DAK diharapkan dapat menghasilkan investasi karena DAK berupaya meningkatkan aset tetap negara untuk meningkatkan pelayanan publik. Nuarisa (2012) menegaskan bahwa DAK berdampak positif terhadap investasi. Santosa dan Rofiq (2013) juga mencatat bahwa DAK tidak memiliki arti penting dalam investasi.

#### **4. *Economic Growth* (PDRB) Dapat Memoderasi PAD Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh pertumbuhan ekonomi (PDB) dan rata-rata PAD atas belanja daerah dengan nilai 0,132 dan nilai 0,895 lebih besar dari 0,05 yang berarti pertumbuhan ekonomi (PDRB) bukan merupakan PAD moderat atas belanja daerah. Hasil penelitian ini menampilkan bahwa investasi pemerintah tidak lebih berharga dari keuntungan nasional. Sementara itu, ekonomi PAD telah menjadi sumber utama belanja modal. Pendapatan awal daerah (PAD) diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah dan mempengaruhi perekonomian nasional. Hasil penelitian ini sejalan dan mendukung penelitian Tuasikal (2008); Arwati & Hadiati (2013); Sugiardi & Supadmi (2014) dan Jaya & Dwirandra (2014) menemukan bukti penting bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh pengeluaran.

#### **5. *Economic Growth* (PDRB) Dapat Memoderasi DAU Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh *Economic Growth* (PDRB) dalam memoderasi DAU Terhadap Belanja Daerah menunjukkan t hitung 0,132 dan dengan nilai signifikansi 0,970 lebih dari 0,05, artinya *Economic Growth* (PDRB) tidak memoderasi DAU terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran adalah dana yang dibiayai dari APBN untuk membiayai belanja daerah yang diperlukan dalam hal pelaksanaan penyaluran (PP No. 55/2005). Penelitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa anggaran berpengaruh terhadap pengeluaran, hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menunjukkan adanya pro dan kontra. Nol sekolah yang berguna antara. Alokasi dana dan pengeluaran pemerintah. Bukti tersebut dapat dikaitkan dengan efek semakin tinggi pendapatan di daerah, semakin tinggi pengeluaran.

#### **6. *Economic Growth* (PDRB) Dapat Memoderasi DAK Terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh *Economic Growth* (PDRB) dalam memoderasi DAK Terhadap Belanja Daerah menunjukkan t hitung 0,132 dan dengan nilai signifikansi 0,970 lebih dari 0,05, artinya *Economic Growth* (PDRB) tidak memoderasi DAU terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini menampilkan bahwa

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diprakarsai oleh APBN dan disalurkan dengan maksud penganggaran sementara untuk mendanai biaya masing-masing daerah sebagai bagian dari pelaksanaan alokasi sumber daya cagar budaya. PPn. 55/2005). Studi Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa belanja publik berdampak pada belanja; Hasil penelitian ini sejalan dengan Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara total pengeluaran dengan pengeluaran. Bukti tersebut dapat dijelaskan dengan fakta bahwa semakin besar pendapatan suatu negara dan semakin banyak daerah yang dimilikinya, semakin tinggi pula total pengeluarannya. Produk Domestik Bruto (PDB) terkait dengan modal yang dibagikan kepada pemilik tanah di daerah, sehingga bisa menjadi pengeluaran yang sangat besar. Ketika ekonomi tumbuh di daerah yang berkembang, lebih banyak bisnis lokal menerima pendapatan lokal. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan konsumsi dan konsumsi penduduk, dan peningkatan pendapatan pemerintah kota, yang juga meningkatkan kemampuan kota untuk membayar pajak federal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan data penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh kepada Belanja Daerah, sedangkan DAU serta DAK Berpengaruh signifikan kepada Belanja Daerah
2. Economic growth (PDRB) tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja daerah, begitu pula dengan DAU serta DAK

### SARAN

Beberapa saran yang bisa diberikan dalam penelitian selanjutnya ialah sebagai:

1. Pola pengukuran pertumbuhan ekonomi harus lebih luas cakupannya, seperti kategori kegiatan dan pendapatan individu.
2. Studi masa depan harus memilih tahun untuk data yang akan dikompilasi dengan hati-hati agar tidak membatasi kecepatan data.
3. Studi lain dapat menambahkan variabel lain seperti margin keuntungan dan pengeluaran dalam mata uang regional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityama erdi,2015, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi, *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2015, Hlm: 190 – 205 Vol. 4, No. 2 ISSN :1979-4878
- Amin, F. (2019). *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Arina, Meylani M. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Economic Growth Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 20, No. 1.

- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Indeks.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jhingan, M. L. (penulis), & Guritno, D. (penerjemah). (2016). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Cetakan ke). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jogiyanto Hartono. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE.
- Juwari. 2016. Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. *Jurnal GeoEkonomi*. Vol. 13, No. 1.
- Nisa, Aulia Afafun. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Bagi Hasil Pajak terhadap Economic Growth Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1, No. 2.
- Mawarni, Darwanis, Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Economic Growth Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2, No. 2.
- Moh. Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Lisa, Yulianus, Priyagus, Roy, Juliansyah Roy. 2017. Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung serta Economic Growth di Indonesia. *JeBM*. Vol.19, No.2.
- Permatasari Isti, 2016 Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016 ISSN : 2460-0585
- Putri, Zuwesty Eka (2019)\_Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi terhadap Economic Growth di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Rahman, Yozi Aulia dan Chamelia, Ayunda Lintang. 2015. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *JEJAK*. Vol. 8, No. 1.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan Daerah. In *Local Government*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif* (ke-1). Alfabeta.
- Talangamin, Olvy Beatriks, Paulus Kindangen, Rosalina A.M. Koleangan (2018)\_Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Economic Growth di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*. Vol. 19, No. 7.
- www.dpr.go.id. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*.
- www.dpr.go.id. (2004). Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Dpr*.
- www.djpk.kemenkeu.go.id . (2005) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- www.ditjenpp.kemenkumham.go.id. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). (1992). Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah.